



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 11

TAHUN 2001

SERI : D

**PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2001-2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 – 2004 yang merupakan arah penyelenggaraan Negara dalam waktu lima tahun mendatang ;
- b. Bahwa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Otonom dan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu memiliki dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif, yang dituangkan dalam pola Dasar Pembangunan daerah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pola Dasar Pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 350);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undan-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)jo Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN
DAERAH PROPINSI DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2001 - 2005**

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang bersifat politis yang memuat filosofi, visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah menjadi kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun dengan tetap memperhatikan arahan GBHN 1999-2004 dan disesuaikan dengankondisi dan potensi serta aspirasi masyarakat yang berkembang di Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya setiap tahun dijabarkan didalam Rancangan Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang realisasinya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Program yang diajukan untuk dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan atau sumber dana lain yang sah .

Pasal 3

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan daerah dan Program Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur merumuskan dan menetapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Mekanisme laporan akuntabilitas, sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansial.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 14 Maret 2001

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKU BUWONO X

Diundang dalam Lembaran Daerah

**Nomor : 11
Seri : D
Tanggal : 14 Maret 2001**

**Sekretaris Daerah
Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta**

**Ir. BAMBANG SUSANTO PRIYOHADI, MPA
NIP.110021674**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2001 – 2005**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh , terarah dan terpadu serta berlangsung terus menerus yang merupakan penjabaran GBHN yang didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan ditetapkannya pelaksanaan GBHN Tahun :999-2004 yang merupakan arah penyelenggaraan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang maka Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus menyesuaikan sehingga perlu segera disusun Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah .

Atas dasar hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi daerah istimewa Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 2 tahun 2001

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2001 - 2005

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Dasar Pemikiran	1
2. Pengertian	1
3. Kedudukan dan Fungsi	1
4. Maksud dan Tujuan	2
5. Landasan	2
6. Ruang Lingkup	2
 BAB II KONDISI UMUM DAN POTENSI DAERAH	 3
1. Geografis	3
2. Sumberdaya Alam	4
3. Kependudukan	5
4. Perekonomian	6
5. Agama dan Sosial Budaya	10
6. Pariwisata	11
7. Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Ketertiban	11
8. Pengembangan Wilayah.....	12
9. Permasalahan Utama	16
10. Ekspresi	18
 BAB III DASAR FILOSOFI, VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH ...	 19
1. Dasar Filosofi Pembangunan Daerah	19
2. Visi Pembangunan Daerah	19
3. Misi Pembangunan Daerah	20
 BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	 22
1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	22
2. Strategi Pembangunan Daerah	25
3. Pendekatan Pembangunan Daerah	26
 BAB V PELAKSANAAN	 31
 BAB VI PENUTUP	 32

BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yang memuat konsepsi tentang arah penyelenggaraan negara, menjadi pedoman untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang.

Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, daerah perlu memiliki konsepsi rencana induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat dasar filosofi, visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi pembangunan daerah, menyusun konsep tentang arah perencanaan di daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pengertian

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah yang memuat filosofi, visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mendasarkan pada kondisi obyektif, potensi riil, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan dan Fungsi

Kedudukan Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan fungsi Pola Dasar Pembangunan Daerah, adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, sektor swasta, dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.

4. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Adapun tujuannya, adalah untuk memberikan arah dan sasaran pembangunan serta menyamakan persepsi bagi seluruh komponen di daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, maju, dan sejahtera, untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

5. Landasan

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 disusun dengan mendasarkan pada landasan :

- a. Landasan Idiil, Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional, UUD 1945;
- c. Landasan Filosofi, Hamemayu Hayuning Bawono;
- d. Landasan Operasional, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999 – 2004;
- e. Landasan Kewenangan Fungsional :
 - 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pola Dasar Pembangunan Daerah mencakup arah, tujuan, dan kebijaksanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang akan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI DAN POTENSI DAERAH

BAB III FILOSOFI, VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

KONDISI DAN POTENSI DAERAH

1. Geografis

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bagian tengah selatan Pulau Jawa, secara astronomis terletak pada 7°33' LS - 8° 12' LS dan 110°00' BT – 110°50' BT, dengan luas 3.185,80 km².

Secara administratif Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan, 45 kelurahan dan 393 desa. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan 45 kelurahan, Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan 75 desa, Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 12 kecamatan 88 desa, Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan 144 desa, dan Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan 86 desa.

Secara fisiografis dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan wilayah, yaitu :

- a. Satuan fisiografi Gunung Api Merapi yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api yang meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul termasuk bentang lahan vulkanik. Daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan wilayah ini terletak pada zone utara di Kabupaten Sleman. Gunung Merapi yang mempunyai karakteristik khusus, menjadi daya tarik untuk dapat dijadikan sebagai obyek studi kegunungapian dan pariwisata. Namun demikian, kawasan ini rawan bencana alam.
- b. Satuan Pegunungan Selatan yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, atau dikenal sebagai Pegunungan Seribu merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus dan selalu kekurangan air dengan bagian tengah terdapat dataran (*Wonosari Basin*). Wilayah ini merupakan bentang lahan solusional, dengan bahan batuan induk batu gamping, mempunyai karakteristik lapisan tanahnya dangkal dan vegetasi penutupnya relatif jarang.
- c. Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kabupaten Kulon Progo bagian utara merupakan bentang lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanahnya kecil.

- d. Satuan Dataran Rendah merupakan bentang lahan fluvial yang didominasi oleh dataran aluvial, membentang di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Wilayah ini merupakan daerah yang subur. Bentang lahan lainnya yang belum didayagunakan secara optimal adalah bentang lahan marin dan eolin yang merupakan satuan wilayah pantai, yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus di Parangtritis Bantul yang terkenal dengan gumuk pasir menjadi laboratorium alam studi geografi.

Selain pengelompokan secara fisiografis, terdapat kawasan-kawasan yang mempunyai potensi bencana alam. Secara umum, jenis-jenis bencana alam yang mengancam Propinsi DIY dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

- a. Bencana alam Gunung Merapi, mengancam wilayah Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sungai yang berhulu di puncak Merapi;
- b. Bencana longsor dan erosi, terutama mengancam wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat serta dataran tinggi Gunungkidul bagian utara;
- c. Wilayah rawan banjir, mengancam daerah pantai selatan Kulon Progo dan Bantul;
- d. Wilayah rawan kekeringan, biasa terjadi di wilayah Gunungkidul bagian selatan;
- e. Wilayah rawan tsunami, terdapat di daerah pantai selatan Kulon Progo dan Bantul;
- f. Bencana alam akibat angin, biasa terdapat di wilayah pantai selatan Kulon Progo dan Bantul serta daerah-daerah kabupaten Sleman bagian utara.

2. Sumberdaya Alam

a. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan secara umum dapat dikelompokkan menjadi lahan sawah seluas 59.729 ha (18,75 %), pekarangan 86.725 ha (27,23 %), tegal 109.432 ha (34,35 %), hutan 17.060 ha (5,36 %) serta pemanfaatan lain-lain 45.571 ha (14,30%).

Salah satu masalah penggunaan lahan adalah makin menurunnya luas lahan pertanian sawah, yaitu seluas ± 330 ha (0,55%) selama lima tahun terakhir (1995 – 1999), karena meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan sektor lainnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

b. Sumberdaya Air

Potensi sumberdaya air yang cukup besar terletak di zona tengah, baik berupa air tanah maupun air permukaan. Besarnya potensi air permukaan ditunjukkan dengan adanya tiga sungai besar yang mengalir di wilayah DIY, yaitu sungai Progo, Opak dan Oyo.

Sedangkan potensi sumberdaya air di zona timur berupa sungai bawah tanah yang banyak dijumpai di Gunungkidul namun belum maksimal pemanfaatannya. Sementara di zona barat terdapat waduk Sermo yang telah dimanfaatkan untuk persediaan air minum dan pertanian.

Keberadaan sumberdaya air tersebut dipengaruhi oleh curah hujan tahunan yang berkisar antara 1.500 mm sampai dengan 2.400 mm. Dengan curah hujan bulanan terkering sebesar 23,20 mm dan terbasah 546 mm. Hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak 4 hari, sedangkan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari sebanyak 24 hari.

c. Bahan Mineral dan Bahan Galian

Potensi sumberdaya alam yang terbesar adalah bahan galian golongan C, seperti pasir, kerikil, batu, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolit serta breksi batu apung. Namun demikian penggunaan yang berlebihan akan merusak lingkungan. Sedangkan bahan galian golongan A berupa batu bara sangat terbatas jumlahnya, begitu pula untuk bahan galian golongan B berupa Pasir Besi (Fe), Mangan (Mn), Barit (Ba) dan Emas (Au) terdapat di kabupaten Kulon Progo dengan jumlah terbatas.

d. Pantai dan Kelautan

Lahan pesisir di Propinsi DIY seluas ± 8.250 Ha yang membujur dari barat sampai ke timur dari kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul, berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata.

Dari luas lahan di atas, 650 Ha berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan budidaya tambak udang/ikan. Sedangkan potensi perikanan laut di pantai selatan sepanjang 110 km baru dapat dimanfaatkan $\pm 7\%$ per tahun yang dieksploitasi dengan peralatan yang sederhana.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1990 sebanyak 2.912.611 jiwa, dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 3.109.142 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 914 jiwa per km² pada tahun 1990, meningkat menjadi 976 jiwa per km² pada tahun 2000. Sedangkan pertumbuhan penduduk pada tahun 1990 – 2000 yaitu 0,65% per tahun. Angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan penduduk tahun 1980 – 1990 yang besarnya 0,58% pertahun. Salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk ini adalah berkaitan dengan kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang relatif aman dan tenteram, sehingga migrasi masuk lebih besar dari pada migrasi keluar.

Persebaran penduduk desa-kota, menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kota jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk desa. Tingginya pertumbuhan penduduk kota ini antara lain karena faktor berubahnya status desa menjadi kota dan atau arus urbanisasi penduduk desa ke kota yang cukup tinggi.

Pengaruh dari keberhasilan gerakan keluarga berencana ditandai dengan makin menurunnya penduduk yang berumur 0 - 14 tahun. Sedangkan sebagai cerminan meningkatnya kesejahteraan penduduk, adalah menurunnya angka kematian, meningkatnya usia produktif dan usia harapan hidup.

4. Perekonomian

a. Perkembangan Ekonomi dan Struktur Lapangan Usaha

Perkembangan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 tahun terakhir (1994-1999) menunjukkan angka yang relatif rendah yaitu sebesar 1,57 % pertahun.

Pertumbuhan ekonomi tahun 1994 sebesar 8,11 %, tahun 1995 sebesar 8,09 %, tahun 1996 sebesar 7,79 %, tahun 1997 sebesar 3,53 %, dan tahun 1998 sebesar -11,28 % serta tahun 1999 sebesar 1,01 %. Untuk tahun 2000 - 2004, diperkirakan akan tumbuh rata-rata 5 % pertahun, dengan catatan inflasi tidak lebih dari 2,51 % dan besarnya investasi pemerintah tidak kurang dari jumlah investasi pada tahun 2000.

Distribusi lapangan usaha dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1994-1999, menunjukkan bahwa lapangan usaha yang mengalami peningkatan yaitu pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan yaitu pertambangan dan penggalian; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; dan jasa.

Berdasarkan distribusi lapangan usaha tersebut, maka secara umum struktur perekonomian daerah menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (1994-1999) belum terjadi pergeseran struktur yang berarti dan sektor tersier adalah yang paling dominan. Sektor primer (pertanian dan pertambangan) mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 19,40% pada tahun 1994 menjadi 22,32% pada tahun 1999, sedangkan sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan bangunan) menurun dari 24,63% pada tahun 1994 menjadi 24,01 % pada tahun 1999, dan sektor tersier (perdagangan; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; dan jasa) yang merupakan sektor yang paling dominan juga menunjukkan sedikit penurunan dari 55,97% pada tahun 1994 menjadi 53,67% pada tahun 1999.

b. Komoditas Unggulan Daerah

Berdasarkan analisis potensi wilayah, komoditas unggulan daerah yang mendukung keberhasilan pembangunan di daerah adalah meliputi komoditas pertanian dalam arti luas, komoditas industri, komoditas pariwisata budaya dan sejarah serta komoditas pendidikan, seni dan budaya.

c. Perkembangan Usaha dan Investasi Daerah

Perkembangan usaha daerah yang berasal dari Perusahaan Daerah Anindya dan Tarumartani secara keseluruhan menunjukkan adanya sedikit peningkatan. Namun demikian dalam pengembangan usaha daerah ini masih juga menghadapi masalah yang berkaitan dengan profesionalisme manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masalah persaingan dan permodalan.

Perkembangan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Non Fasilitas pada tahun 1996 hingga tahun 1999 secara umum menunjukkan gejala penurunan.

d. Ketenagakerjaan

Lapangan pekerjaan utama yang banyak menyerap tenaga kerja baik pada tahun 1990 maupun pada tahun 1999 adalah pertanian, jasa, perdagangan, dan industri. Perkembangan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan, mulai menunjukkan suatu pergeseran yaitu dari sektor primer yang bersifat tradisional (lapangan pekerjaan pertanian) yaitu dari 45,98% turun menjadi 31,47%, sektor tersier (lapangan pekerjaan perdagangan, keuangan dan jasa) dari 34,39% naik menjadi 48,52%, dan sektor sekunder (lapangan pekerjaan industri pengolahan) dari 19,63% naik menjadi 20,01% yang bersifat lebih modern.

Pemerintah telah berupaya untuk memperluas kesempatan kerja, yaitu dari 1.392.552 orang pada tahun 1990 menjadi 1.624.079 orang pada tahun 1999 sehingga terdapat pertumbuhan sebesar 1,18%. Namun demikian dengan menurunnya laju pertumbuhan perekonomian daerah, sejumlah angkatan kerja yang belum tertampung dalam lapangan kerja jumlahnya cukup banyak. Pada tahun 1990 jumlah angkatan kerja ada 1.521.447 orang telah meningkat menjadi 1.624.079 orang pada tahun 1999 atau terdapat pertumbuhan sebesar 0,73%. Berdasarkan dari data tersebut maka jumlah pengangguran pada tahun 1990 ada 37.731 orang atau dengan tingkat pengangguran sebesar 2,48% dan pada tahun 1999 menjadi 76.449 orang atau dengan tingkat pengangguran sebesar 4,71%. Sedangkan setengah pengangguran dari 38,72% telah turun menjadi 35,03%. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap menurunnya proporsi kesempatan kerja formal yaitu dari 47,53% menjadi 39,58% sedangkan informal meningkat dari 52,47% menjadi 60,42%.

e. Pertanian

Penggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dikelompokkan menjadi lahan sawah seluas 59.729 ha, lahan pekarangan 86.725 ha, tegalan seluas 109.432 ha, hutan 17.060 ha. Penggunaan lahan sawah yang didasarkan pada jenis pengairan meliputi pengairan teknis seluas 18.547 ha, irigasi setengah teknis 23.729 ha, irigasi sederhana seluas 6.907 ha, irigasi desa seluas 1.786 ha serta sawah tadah hujan seluas 8.760 ha.

Potensi perikanan darat meliputi kolam seluas 4.630,2 ha, sawah seluas 10.365,6 ha, perairan umum seluas 3.133,5 ha, sedangkan perikanan laut di pantai selatan sepanjang 110 km dengan pantai berpasir seluas 650 ha berpotensi untuk dikembangkan tambak permanen maupun pembenihan (*hatchery*). Potensi peternakan, antara lain luasan tegal sebesar 34,35 % dari luas keseluruhan sebagai potensi untuk pengusahaan hijauan makanan ternak (HMT).

Apabila dilihat dari sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 1999 sebesar 15,48 % merupakan sumbangan terbesar ketiga setelah jasa, perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian pada tahun 1999 sebesar 31,47 %, hal ini merupakan lapangan pekerjaan utama terbesar penduduk DIY.

Komoditas tanaman pangan yang dominan dari sisi produksi adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang tanah, dan buah-buahan, sedangkan tanaman perkebunan meliputi kelapa, kopi, kakao dan jambu mete, tanaman kehutanan yang dominan adalah minyak kayu putih dan kayu pertukangan. Dari subsektor peternakan produk dominan adalah daging, telur dan susu, sedangkan produk dominan dari subsektor perikanan meliputi ikan air tawar, benih ikan/ udang dan ikan hias.

Apabila melihat pola konsumsi penduduk DIY tahun 1999, yang melebihi standard pola pangan harapan (PPH) konsumsi tingkat nasional adalah padi-padian, umbi-umbian, buah/biji berminyak dan gula, sedangkan pola konsumsi yang masih dibawah PPH nasional adalah pangan hewani, minyak dan lemak. Untuk konsumsi kacang-kacangan, sayuran dan buah sudah mendekati standard PPH nasional.

f. Industri Kecil dan Menengah

Perkembangan potensi industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima tahun terakhir menunjukkan suatu keadaan yang relatif stabil terhadap gejolak krisis ekonomi.

Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya unit usaha industri kecil dan menengah yang eksis yaitu pada tahun 1994 ada 76.489 unit usaha, dengan nilai investasi sebesar Rp 343.107 juta, dan nilai produksi sebesar Rp 691.646 juta, yang menyerap tenaga kerja 206.474 orang. Kemudian pada tahun 1999 ada 77.526 unit usaha, dengan nilai investasi sebesar Rp 412.845 juta, dan nilai produksi sebesar Rp 1.109.394 juta, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 219.279 orang. Namun demikian untuk mengembangkan potensi industri kecil dan menengah masih menghadapi permasalahan seperti permodalan dan pemasaran.

Industri kecil dan kerajinan di Yogyakarta mempunyai keunggulan komparatif karena mampu menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan sumberdaya alam setempat, serta mempunyai keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya manusia yang potensial, institusi yang ada baik dari Perguruan Tinggi maupun dari Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang), sehingga secara sinergi mendukung pariwisata dan perdagangan daerah.

Beberapa sentra industri telah menjadi desa wisata dan desa kerajinan seperti Desa Kasongan Bantul (kerajinan gerabah), Desa Pucung Bantul (kerajinan kayu primitif), Desa Pundong Bantul (kerajinan gerabah), Desa Manding Bantul (kerajinan kulit), Desa Putat Gunungkidul (kerajinan topeng), Desa Sendari Sleman (kerajinan bambu), Tirtodipuran Yogyakarta (kerajinan batik).

Sumbangan sektor industri dan perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY tahun 1998 dan 1999 masing-masing 48,93 % dan 57,81 %. Realisasi ekspor DIY pada tahun 1999 sebesar US \$ 91,6 juta dengan volume sebesar 36.218 ton, sedangkan jumlah mata dagangan ekspor seluruhnya mencapai 74 dagangan dengan pelaku ekspornya sebanyak 155, dan negara tujuan ekspor 71 negara. Beberapa komoditas ekspor unggulan DIY antara lain tekstil dan produk tekstil, mebel kayu dan kerajinan kayu, kulit dan produk kulit, gerabah/keramik, jamur dalam kaleng, kerajinan besi dan kerajinan perak.

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pencerminan dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 berdasarkan perhitungan APBD mengalami penurunan, baik dari aspek pendapatan maupun dari aspek belanja.

Pada tahun 1995/1996 realisasi jumlah pendapatan sebesar Rp.247.656.753.816,49 turun menjadi Rp.196.604.983.894,00 pada tahun 1999/2000. Penurunan ini salah satu faktornya adalah menurunnya pendapatan yang berasal dari sumbangan dan bantuan atau bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi menurun jumlahnya. Pada tahun 1995/1996 jumlah sumbangan dan bantuan ada Rp.159.620.258.579,00 kemudian pada tahun 1999/2000 bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi hanya sebesar Rp.114.127.200.543,31. Sedangkan dilain pihak Pendapatan Asli Daerah ada sedikit peningkatan yaitu dari Rp.46.691.239.552,36 pada tahun 1995/1996 menjadi Rp.57.877.499.768,81 pada tahun 1999/2000.

Sedangkan dari aspek belanja, realisasi pada tahun 1995/1996 sebesar Rp.235.570.680.179,28 yang terdiri dari belanja rutin Rp. 169.757.326.541,52 dan belanja pembangunan Rp. 39.938.107.839,09 serta urusan kas dan perhitungan sebesar Rp 25.875.245.798,67. Pada tahun 1999/2000 jumlah belanja sebesar Rp.172.635.129.754,73 yang terdiri dari belanja rutin sebesar Rp.103.997.630.249,28, dan belanja pembangunan Rp. 53.014.934.124,45, serta urusan kas dan perhitungan sebesar Rp 15.622.565.381.

5. Agama dan Sosial Budaya

a. Agama

Iman dan taqwa sebagai hasil manifestasi kehidupan beragama adalah merupakan sumber inspirasi, sumber motivasi dan merupakan modal dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mengurangi/menghilangkan penyakit sosial yang saat ini marak berkembang di daerah.

Kondisi yang ada menunjukkan bahwa tingkat keimanan dan ketaqwaan masih perlu ditingkatkan dan diaktualisasikan berdasarkan norma-norma agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

b. Kebudayaan

Karakteristik umum masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah tabah, sederhana dan hemat, berani mawas diri, gotong royong dalam kebersamaan, tenggang rasa dan memiliki jiwa patriotisme, serta dapat menyesuaikan terhadap sesama, merupakan sikap mental yang perlu diupayakan kelestariannya. Di samping itu Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki seni budaya yang adiluhung dan berbagai peninggalan budaya masa lalu yang mempunyai nilai tinggi, serta menjadi tempat bertemunya berbagai macam budaya yang dibawa oleh para pendatang, yang justru diharapkan akan memperkuat budaya bangsa Indonesia.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum krisis ekonomi secara kuantitas dan kualitas telah menunjukkan peningkatan, hal ini tampak dengan menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan penduduk meningkat. Namun semenjak masa krisis tingkat pendidikan menunjukkan adanya penurunan. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat.

d. Kesehatan

Derajat kesehatan dan gizi masyarakat telah menunjukkan peningkatan, hal ini terlihat adanya perbaikan beberapa indikator kesehatan, antara lain menurunnya angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya status gizi dan menurunnya angka kesakitan serta meningkatnya usia harapan hidup. Namun demikian perilaku hidup sehat masyarakat masih perlu ditingkatkan.

e. Keluarga Pra Sejahtera

Berdasarkan hasil pendataan keluarga pada tahun 1994 hingga tahun 1997 secara umum jumlah keluarga pra sejahtera mengalami penurunan. Tetapi sejak tahun 1998 sampai tahun 1999 jumlah keluarga pra sejahtera meningkat, sejalan dengan keadaan krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia.

6. Pariwisata

Pariwisata DIY masih bertumpu pada pariwisata budaya, sejarah dan pendidikan, dengan obyek utama adalah kraton, candi, museum, dan perguruan tinggi. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini, jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY mengalami penurunan. Pada tahun 1997 jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 6.644.145 orang, dan tahun 1998 jumlah kunjungan 3.762.114 orang atau menurun 44,38 %. Sedangkan pada tahun 1999 jumlah kunjungan 5.209.449 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 1998 mengalami peningkatan 38,47 %.

Lama tinggal wisatawan di DIY masih rendah. Pada tahun 1997 lama tinggal wisatawan Nusantara hanya 1,61 hari, dan wisatawan manca negara 2,11 hari. Pada tahun 1998, rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara 1,5 hari dan wisatawan manca negara 1,91 hari. Sedangkan untuk tahun 1999 rata-rata lama tinggal wisatawan Nusantara 1,79 hari dan wisatawan manca negara 2,47 hari.

7. Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Ketertiban

a. Aparatur Pemerintah

Dari segi kuantitas jumlah aparatur pemerintah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1999 sudah sangat memadai. Namun dari sisi kualitas, perlu ditingkatkan karena dari sebagian besar aparat Pemerintah Daerah (Pemda) berpendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA). Di samping itu apabila dilihat dari sisi persyaratan perlu mendapatkan perhatian, karena banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan formasi. Sedangkan untuk sarana prasarana yang dimiliki, relatif sudah cukup memadai, namun distribusi penggunaannya perlu ada pemerataan.

Dari segi kelembagaan yang ada sekarang, masih terjadi duplikasi tugas dan fungsi sehingga mengakibatkan tidak efektifnya kegiatan dan rendahnya efisiensi kinerja Pemda. Untuk itu perlu diadakan penataan ulang struktur organisasi Pemda, berdasar kewenangan dan beban tugas yang ada.

Pelayanan yang diberikan oleh aparat Pemda, masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu perlu peningkatan kinerja dan etos kerja aparatur pemerintah di semua jenjang pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dan secara terpadu bagi masyarakat.

b. Politik

Kondisi politik di Daerah Istimewa Yogyakarta relatif stabil dan kondusif, walaupun terjadi konflik politik dan gejolak konflik serta kerawanan-kerawanan sosial, tetapi tidak banyak berpengaruh terhadap stabilitas politik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain kesadaran dan partisipasi politik masyarakat DIY sudah cukup tinggi. Hal ini terlihat pada antusias masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, kampanye pemilu dan penggunaan hak pilih dalam pemilu.

c. Keamanan dan Ketertiban

Berbagai kerawanan yang timbul berpengaruh pada rasa aman dan kedamaian masyarakat. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran segenap warga akan pentingnya perlindungan dan pengamanan masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat.

8. Pengembangan Wilayah

Wilayah sebagai ajang pembangunan, pengembangannya didasarkan pada satuan geografi beserta segenap unsur yang terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

Berdasarkan aspek fungsional, di Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkembang hubungan interaksi desa kota yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Perkembangan wilayah perkotaan sampai dengan saat ini, telah memunculkan adanya skala atau hirarki dari wilayah perkotaan atau kota. Secara fungsional, di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat wilayah perkotaan Yogyakarta yang secara administratif meliputi Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan sebagian wilayah Kabupaten Bantul. Pada hirarki yang lebih rendah, terdapat ibukota Kabupaten dan kota kecamatan, selanjutnya terdapat pula kota-kota yang hirarkinya lebih rendah.

Untuk memacu pertumbuhan antar wilayah agar lebih serasi, dilakukan pengembangan wilayah, antara lain meliputi :

a. Pengembangan Wilayah Terpadu

Pembangunan daerah dengan pendekatan pengembangan wilayah terpadu bertujuan untuk menterpadukan berbagai sektor kegiatan sehingga dapat lebih mengoptimalkan tujuan dan sasaran pembangunan pada masing-masing wilayah berdasarkan kondisi obyektif dan potensi riil di wilayah yang bersangkutan, dengan menetapkan sektor utama, dan sektor penunjang yang tersinergi dalam satu kesatuan wilayah.

b. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan

Pengembangan kawasan sentra produksi/andalan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pada kawasan tersebut, sebagai andalan daerah, guna memacu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kawasan Sentra Produksi berfungsi sebagai sentra atau aglomerasi ekonomi yang diharapkan akan memacu pengembangan wilayah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada 8 (delapan) sub kawasan sentra produksi/andalan yang masing-masing mempunyai karakteristik pengembangan berbeda, yaitu :

- 1) Sub kawasan Kota Yogyakarta dengan beberapa kota satelit di sekitarnya,
- 2) Sub Kawasan Prambanan - Ratu Boko,
- 3) Sub Kawasan Piyungan,
- 4) Sub Kawasan Gamping - Sedayu,
- 5) Sub Kawasan Tempel - Kaliurang - Pakem,
- 6) Sub Kawasan Pajangan - Sentolo,
- 7) Sub Kawasan Kretek - Parangtritis, dan
- 8) Sub Kawasan Imogiri - Pundong.

Dengan sebaran ini, diharapkan akan terjadi persebaran efek ganda pembangunan.

c. Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan

Pendekatan Pengembangan Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan, meliputi bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Dinamisasi Birokrasi, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Untuk bidang ekonomi mendasarkan pada kegiatan ekonomi, baik yang menyangkut sektor primer (pertanian dan pertambangan), sektor sekunder (industri pengolahan), maupun sektor tersier (jasa pelayanan). Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya kemampuan masyarakat, mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya melalui pendekatan fungsi kewilayahan dan pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*). Sebagai model pembangunan, diharapkan dapat mengakomodasi pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai titik berat pada kabupaten/kota. Konstelasi kecamatan, dalam hal ini adalah sebagai titik temu antara kebutuhan pada tingkat kabupaten dan masyarakat di perdesaan sebagai produsen. Dalam model ini diharapkan akan terjadi interaksi yang lebih efektif antara fungsi produksi, distribusi dan pasar.

Untuk tahap pertama, 14 Kecamatan sebagai model pilot proyek tersebut, meliputi Piyungan, Pundong, dan Srandakan (Kabupaten Bantul), Godean, Pakem, dan Turi (Kabupaten Sleman), Temon, Sentolo, Samigaluh, dan Galur (Kabupaten Kulon Progo), Ponjong, Tepus, Playen, dan Semin (Kabupaten Gunungkidul).

d. Pengembangan Kawasan Strategis

Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, pasti terdapat perbedaan kondisi dan potensi di masing-masing wilayah. Dari segi spasial terdapat wilayah-wilayah yang tumbuh cepat maupun lambat, sedangkan dari segi potensi sosial ekonomi terdapat wilayah-wilayah yang mampu berkembang karena masyarakatnya mampu memanfaatkan potensi dan kondisi yang berada di wilayah tersebut. Pengembangan kawasan strategis dimaksudkan untuk mempercepat terbentuknya struktur dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya beberapa program, mulai dari tata ruang sampai dengan program pengembangan dan percepatan pemanfaatan potensi, maka untuk mengendalikan dampak negatif yang mungkin timbul, baik dalam bentuk kesenjangan antar wilayah, maupun pemanfaatan sumberdaya yang melebihi daya dukung, perlu disiapkan perencanaan pelaksanaan program-program pada masing-masing wilayah tersebut.

e. Kawasan Tertinggal

Pengembangan kawasan tertinggal berfungsi sebagai upaya untuk mendorong pembangunan agar lebih merata. Dari sudut wilayah, kawasan ini merupakan kawasan residual dari kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah yang selama ini lebih banyak disentuh oleh program pembangunan sehingga kondisinya menunjukkan lebih maju.

Konsep pengembangan pada kawasan tertinggal ini adalah kebalikan dari kawasan strategis yang tumbuh cepat. Program pembangunan harus lebih bersifat pemberdayaan dan pemenuhan pelayanan, baik sarana dan prasarana, maupun pelayanan fasilitas umum beserta peningkatan bina usaha perekonomian, bina manusia pada wilayah dan peningkatan lingkungan yang berkelanjutan

f. Pengembangan Sistem Kota-kota

Pengembangan sistem kota-kota dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan kota-kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta agar berkembang sesuai dengan fungsi pelayanan dan interaksi baik antar kota maupun terhadap wilayah belakangnya agar lebih sinergis dalam rangka pengembangan wilayah.

Seiring dengan makin meningkatnya jumlah penduduk kota, maka sebagai upaya untuk mengembangkan sistem dan jaringan pelayanan kota sekaligus untuk pemerataan pembangunan, telah diidentifikasi kota-kota secara hirarkis, sebagai berikut :

1) Hirarki Pertama :

- Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan, pelayanan dan pemerintahan.

2) Hirarki Kedua :

- a) Kabupaten Sleman : Kota Sleman, Tempel, Kalasan, Prambanan, Ngemplak, Mlati, Gamping, Godean, Moyudan, dan Depok.
- b) Kabupaten Bantul : Kota Bantul, Kasihan, Sewon, dan Banguntapan.
- c) Kabupaten Kulon Progo : Kota Wates dan Pengasih.
- d) Kabupaten Gunungkidul : Kota Wonosari dan Patuk.

3) Hirarki Ketiga :

- a) Kabupaten Sleman : Kota Ngaglik, Pakem, Berbah, dan Minggir.
- b) Kabupaten Bantul : Kota Imogiri, Kretek, Srandakan, Sedayu, dan Piyungan.
- c) Kabupaten Gunungkidul : Kota Playen, Paliyan, Semin, Karangmojo, dan Rongkop.
- d) Kabupaten Kulon Progo : Kota Nanggulan, Temon, Sentolo, dan Galur.

4) Hirarki Keempat :

- a) Kabupaten Sleman : Kota Seyegan, Turi, dan Cangkringan.
- b) Kabupaten Bantul : Kota Pleret, Jetis, Pundong, Sanden, Pandak, Bambanglipuro, Pajangan dan Dlingo.
- c) Kabupaten Gunungkidul : Kota Panggang, Semanu, Tepus, Nglipar, Ngawen, Ponjong, Gedangsari, Saptosari, Purwosari, Tanjungsari, dan Girisubo.
- d) Kabupaten Kulon Progo : Kota Lendah, Panjatan, Kokap, Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh.

g. Daerah Perbatasan dan Wilayah Pantai Selatan

Daerah perbatasan dikembangkan dalam rangka mendorong keserasian, keseimbangan dan percepatan laju pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan dan keserasian pembangunan, serta menghindarkan konflik antar daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada. Untuk itu dilakukan secara bersama antar kabupaten/kota dan antara Propinsi DIY dan Propinsi Jawa Tengah pada wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan juga untuk menserasikan pemanfaatan ruang antar kabupaten/kota dan antara Propinsi DIY dan Propinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelayanan serta penyediaan prasarana di kedua wilayah yang berbatasan.

Dalam pengembangan daerah perbatasan ini telah diusahakan penanganan kegiatan, antara lain meningkatkan kepedulian masyarakat pinggiran/perbatasan terhadap wilayahnya, memajukan wilayah pinggiran, serta kerjasama antar kabupaten/kota maupun antara Propinsi DIY – Propinsi Jawa Tengah.

Bagian wilayah yang perlu ditangani secara terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah kawasan pantai selatan yang membentang dari barat Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, sampai ke timur Kabupaten Gunungkidul, sepanjang $\pm$ 110 km. Penanganan kawasan ini dilakukan secara terpadu antar sektor, baik penggunaan untuk pertanian lahan kering, peternakan, perikanan, pariwisata, olahraga, juga kegiatan-kegiatan ritual. Penataan ruang dan penyiapan prasarana penunjang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan memperhatikan ekologi lingkungan hidup yang ada (termasuk laboratorium gumpul pasir di pantai Parangtritis).

h. Penataan Ruang dan Pertanian

Sebagai acuan dalam penyusunan tata ruang wilayah Propinsi DIY adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan hasil kesepakatan dalam rapat Konsultasi Regional serta forum Sad Praja Utama wilayah Jawa – Bali. Kegiatan penataan ruang yang telah dihasilkan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi DIY, RTRW Kabupaten/Kota dan Tata Ruang yang berskala Kawasan. Pada saat ini belum semua wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rencana induk sistem prasarana wilayah, maupun design kawasan tumbuh cepat. Secara riil, kegiatan penataan ruang tidak dapat dipisahkan dengan masalah pertanian.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penataan ruang, antara lain kurangnya sosialisasi rencana tata ruang kepada masyarakat dan kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Sementara permasalahan bidang pertanahan di perkotaan adalah sulitnya mendapatkan lahan untuk keperluan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan di daerah perdesaan adalah makin menyempitnya luas lahan pertanian yang dimiliki sebagian besar keluarga petani. Masalah lain adalah banyaknya tanah yang belum bersertifikat.

9. Permasalahan Utama

Walaupun beberapa kondisi dan potensi di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menunjukkan tingkat yang cukup memadai, tetapi ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi dan harus segera ditangani, antara lain :

a. Belum Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Baik

Hal ini disebabkan antara lain karena masih rendahnya kemampuan penegakan supremasi hukum, masih adanya peraturan yang kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan agenda reformasi, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur terhadap peraturan, belum optimalnya penerapan hukum dan kurangnya prasarana dan sarana hukum yang memadai, kurang optimalnya pelayanan publik berdasarkan standard minimal pelayanan publik, masih terbatasnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesional, belum tertatanya kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efisien dan efektif yang mengarah pada pelaksanaan otonomi daerah, dan belum mantapnya sistem pengawasan aparatur pemerintah, masih terjadinya kerawanan sosial politik yang dapat mengganggu stabilitas sosial politik serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa, belum tersebarnya secara merata informasi bagi masyarakat sehingga tingkat pemahaman informasi diantara masyarakat relatif masih rendah.

b. Belum Pulih dan Belum Kuatnya Ketahanan Perekonomian Daerah

Hal ini disebabkan antara lain karena masih lemahnya proses pemulihan ekonomi, belum terwujudnya stabilitas ekonomi, belum terwujudnya realokasi sumberdaya pembangunan yang mantap, belum efektifnya pengelolaan keuangan daerah, masih lemahnya usaha kecil, menengah dan koperasi, belum kuatnya institusi pasar, belum terciptanya sistem ketahanan pangan, belum berkembangnya industri yang berdasarkan keunggulan kompetitif, masih lemahnya jasa pelayanan prasarana, belum terwujudnya restrukturisasi dan reformasi bidang prasarana, lemahnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan prasarana, masih lemahnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, belum berkembangnya sistem ketenagakerjaan, masih lemahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, masih lemahnya pengelolaan kehutanan dan perkebunan, masih lemahnya pengembangan sistem perdagangan, usaha kecil dan menengah, belum meratanya pembangunan transportasi, masih lemahnya pengelolaan pariwisata, masih lemahnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi, serta belum berkembangnya secara optimal pengelolaan pertambangan dan energi.

c. Rendahnya Kesejahteraan Rakyat dan Lemahnya Ketahanan Budaya

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya masalah-masalah pertumbuhan penduduk perkotaan yang cukup besar dengan kawasan tidak layak huni dan masyarakat pra sejahtera, masih belum merata dan masih lemahnya mutu pelayanan kesehatan, munculnya kasus penyakit menular di suatu daerah dan makin menggejalanya penyalahgunaan narkoba, makin kompleknya permasalahan sosial, adanya gejala penurunan moral dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, belum meratanya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, gejala menurunnya ketahanan budaya daerah terhadap pengaruh budaya luar/asing yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta, belum berkembangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam lingkungan masyarakat, meningkatnya gangguan keamanan, belum berkembangnya kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, dan masih rendahnya kesetaraan gender.

d. Rendahnya Pemberdayaan Masyarakat

Hal ini antara lain disebabkan karena belum mantapnya kesiapan dalam pelaksanaan otonomi daerah, masih terdapatnya kesenjangan pertumbuhan antar wilayah karena kondisi dan potensi yang berbeda, kurang transparannya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan di daerah, masih kurangnya pelibatan masyarakat ke dalam proses pembangunan daerah, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi di wilayahnya, masih lemahnya partisipasi aktif dan langsung dari masyarakat terhadap proses pembangunan, dan masih belum terbentuknya proses dan mekanisme dalam satu kesatuan sistem di masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dan langsung dalam proses pembangunan daerah.

10. Ekspresi

Dari uraian kondisi umum dan potensi daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kekuatan di bidang kebudayaan, pendidikan, industri kecil kerajinan, pariwisata, perikanan, pertanian dalam arti luas, dan penduduk urban. Dengan kondisi tersebut peluang yang ada adalah pengembangan sumberdaya manusia dan manajemen di bidang tersebut, agar mempunyai nilai tambah bagi kepentingan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, fasilitasi sektor swasta dan publik dari Pemerintah Daerah serta menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat, daerah lain, serta dari luar negeri untuk investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

FILOSOFI, VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Dasar Filosofi Pembangunan Daerah

Dasar filosofi pembangunan daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah ***Hamemayu Hayuning Bawono***, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Hakikat budaya adalah hasil *cipta, karsa dan rasa*, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah DIY, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (*intern*) maupun ke luar (*extern*). Secara filosofis, budaya Jawa Khususnya budaya DIY dapat digunakan sebagai sarana untuk ***Hamemayu Hayuning Bawono***. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat *ayom, ayem, tata, titi tentrem, karto raharjo*. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat telah diupayakan dan dilaksanakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan diteruskan oleh pengganti beliau, tetap dengan semangat ***Hamemayu Hayuning Bawono***, yang artinya kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud inipun mencakup seluruh peri kehidupan dalam skala kecil, yaitu keluarga ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan dharma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

2. Visi Pembangunan Daerah

Bertitik tolak dari kondisi dan potensi di atas, maka visi pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan”.

Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkan visi tersebut, antara lain :

- a. Terbentuknya citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif, berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Tersedianya lapangan kerja yang memberikan penghasilan cukup bagi masyarakat secara adil dan merata.
- c. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik, sehingga faktor sumberdaya manusia yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat, sehingga dapat diandalkan dalam persaingan global.
- d. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta sumberdaya yang berkelanjutan, dengan mengembangkan kerukunan hidup antar komponen masyarakat, baik antara agama, suku dan budaya.
- e. Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan.
- f. Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan di dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah.

3. Misi Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi Pembangunan serta kondisi yang diharapkan akan terbentuk secara bertahap tersebut di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah, sebagai berikut :

- a. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi.
- b. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan Terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pusat Budaya, dan didukung oleh pilar-pilar pengembangan budaya dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa (IMTAQ), serta mampu memilih dan menyerap Budaya Modern yang positif dan tetap melestarikan Budaya Daerah
- c. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pembangunan yang terpadu, komplementatif dan sinergi antar wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah, melalui ketahanan sosial budaya dan ketahanan sumberdaya, yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah Tujuan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai simpul strategis dan penting, dalam perhubungan dan komunikasi di Pulau Jawa.
- f. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan industri sedang dan kecil non polutan serta industri rumah tangga modern, yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan seni daerah, dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global.

- g. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (Pertanian tanaman pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan), yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar lokal, regional dan global, dengan produk Agrobisnis dan Agroindustri yang kompetitif.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Arah pembangunan daerah berisikan kebijakan pembangunan daerah, perlu dipedomani di segala bidang pembangunan daerah. Diharapkan dapat dicapai secara bertahap dalam jangka waktu lima tahunan, dalam empat tahapan baik yang menyangkut kepentingan Daerah sendiri dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maupun dalam rangka menunjang pembangunan nasional, maka perlu dilaksanakan strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup bagi seluruh warga masyarakat yang berkeadilan, memantapkan ketahanan budaya dan menciptakan iklim budaya ilmiah sebagai pusat pendidikan terkemuka di Indonesia, membentuk struktur ekonomi yang kuat dengan dukungan ekonomi kerakyatan dalam persaingan global, menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai simpul strategis dan salah satu pusat tujuan utama pariwisata di Indonesia dalam rangka memantapkan otonomi daerah, dengan arah kebijakan dan strategi serta pendekatan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dengan memperhatikan kondisi obyektif dan potensi riil yang ada serta pengalaman pembangunan di masa lalu, disusunlah agenda pembangunan sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membawa dampak lemahnya perekonomian daerah yang mempengaruhi rendahnya kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan munculnya krisis multidimensional, yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan yang kurang profesional dalam pelayanan publik karena kurang keterbukaan, masih rendahnya penegakan supremasi hukum dan masih dihindangi adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, yang mengakibatkan kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan kurang berdayanya masyarakat.

Permasalahan yang saling terkait tersebut, membutuhkan penanganan yang sinergik, terkoordinatif, terfokus dengan penentuan agenda pembangunan yang cermat. Untuk itu arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2001 – 2005 meliputi, Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik, Pemulihan dan Ketahanan Ekonomi Daerah, Membangun Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya, serta Pemberdayaan Masyarakat, yang masing-masing agenda yang dilaksanakan akan didukung dengan data pelaksanaan secara berurutan (*time series*) diharapkan dapat menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun.

a. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih

Agenda pembangunan ini diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang profesional, produktif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan agenda tersebut diupayakan melalui penegakan supremasi hukum, meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dengan memberdayakan aparat penegak hukum, serta melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan pengawasan aparatur pemerintah serta peningkatan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan publik, dengan menetapkan standar pelayanan minimum pada masyarakat. Dalam rangka usaha transparansi, maka peningkatan penyebarluasan dan pemerataan informasi serta peningkatan mutu jangkauan informasi sangat diperlukan. Langkah ini sekaligus dapat menunjang peningkatan kesadaran, partisipasi, etika dan kemandirian berpolitik dalam rangka mewujudkan kehidupan politik yang demokratis di daerah.

b. Memulihkan Ketahanan Ekonomi Daerah

Pemulihan dan ketahanan ekonomi daerah dalam rangka memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, diwujudkan melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan sumberdaya pembangunan lainnya secara optimal, yang didukung dengan mengembangkan pemanfaatan tenaga kerja serta meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya jangka pendek dalam pemulihan ekonomi adalah mempertahankan stabilitas ekonomi, menciptakan suasana yang kondusif bagi dunia usaha dan realokasi sumberdaya pembangunan.

Untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan dasar demokratisasi ekonomi, dilakukan langkah-langkah meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, mengentaskan kemiskinan, menguatkan institusi pasar, meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis, meningkatkan pengelolaan potensi kelautan, dan mengembangkan industri berdasarkan keunggulan kompetitif. Pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan, selain untuk memulihkan dan memantapkan ketahanan ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dikelola dengan prinsip memelihara kelestarian lingkungan hidup.

c. Membangun Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya

Upaya membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya selain merupakan tujuan sekaligus juga merupakan sarana untuk membangun rakyat yang sejahtera, sehat, terdidik, beriman dan bertaqwa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suasana kehidupan yang aman dan tertib. Langkah-langkah yang akan dilakukan, adalah :

- 1) Merumuskan dan melembagakan kebijakan kependudukan yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas dan pengarahan persebaran serta mobilitas penduduk, peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta tersedianya data, informasi dan administrasi kependudukan yang berkualitas.
- 2) Mendukung terwujudnya Yogyakarta Sehat 2005 dengan paradigma sehat (preventif dan represif daripada kuratif), yaitu memberdayakan individu dan masyarakat dalam kesehatan, dengan mewujudkan mutu lingkungan yang sehat, meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta mutu gizi masyarakat yang baik, sehingga faktor sumberdaya manusia dapat diandalkan dalam persaingan global.
- 3) Meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan ajaran agama menuju terciptanya akhlak yang mulia, menumbuhkan dan mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, dan mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam suasana yang kondusif di tengah keragaman agama, budaya dan etnis masyarakat.
- 4) Mewujudkan ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap, dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Mewujudkan masyarakat yang terdidik sehingga mampu bersaing dalam kehidupan bangsa yang makin maju, mewujudkan pemerataan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di semua wilayah dalam berbagai jenjang pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan pelayanan pendidikan dengan penyempurnaan manajemen sistem pendidikan. Mengembangkan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan kegiatan dunia usaha, menyelaraskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai budaya daerah, meningkatkan efisiensi serta efektivitas penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- 5) Meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa dalam rangka, melestarikan warisan budaya daerah sebagai peninggalan para leluhur bangsa yang mempunyai nilai-nilai luhur dan mampu menangkal pengaruh budaya luar/asing dalam rangka mewujudkan jati diri bangsa.
- 6) Meningkatkan kemampuan kelembagaan di kalangan masyarakat, menyediakan bantuan bagi warga masyarakat miskin, memberikan dukungan dan mendorong terselenggaranya sistem jaminan sosial, mengembangkan lembaga keswadayaan di masyarakat.
- 7) Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman, serta menumbuhkan kesadaran bela negara bagi masyarakat untuk terpeliharanya persatuan dan kesatuan warga masyarakat, meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan, mewujudkan pemuda yang berwawasan kebangsaan dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi, fasilitasi kegiatan olah raga, mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta pengembangan olah raga.

d. Memberdayakan Masyarakat

Kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan menciptakan suasana yang kondusif sesuai dengan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah yang akan dicapai melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas Pembangunan Daerah untuk mengembangkan ekonomi daerah dan wilayah dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan wilayah dengan didasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah, serta pemecahan permasalahan pokok yang dihadapi daerah, dengan selalu melibatkan masyarakat secara langsung dan aktif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatannya.

- 2) Perwujudan pengelolaan kota dan perdesaan yang berkualitas, menciptakan kawasan yang layak huni, berkeadilan dan berbudaya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat serta mewujudkan pusat pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan pusat pemerintahan sesuai aspirasi masyarakat.
- 3) Peningkatan ketersediaan rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah tetapi layak huni, berbudaya, ramah terhadap lingkungan, yang dibangun sesuai dengan kehendak dan kemampuan masyarakat pengguna, dengan mewujudkan kebijaksanaan penggunaan tanah yang adil.
- 4) Penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan yang tertib, dan mengembangkan kinerja lembaga pengelola pertanahan, didukung dengan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang, penyiapan rencana induk sistem dan perencanaan (*design*) kawasan yang efektif, transparan dan partisipatif. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

2. Strategi Pembangunan Daerah

a. Strategi Jangka Panjang

- 1) Mendukung pembangunan sektor-sektor ekonomi dengan penekanan sektor unggulan, secara terpadu dan tersinergi antar sektor dan antar wilayah.
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, yang dapat diandalkan dalam persaingan global.
- 3) Memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab yang didukung aparatur pemerintah yang handal, profesional, transparan dan akuntabel.

b. Strategi Jangka Pendek

- 1) Menanggulangi pengangguran dan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat miskin.
- 2) Menyiapkan perangkat lunak dan perangkat keras serta aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- 3) Menjamin kehandalan ketahanan pangan yang merata kepada segenap masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana baik bersifat fisik maupun non fisik yang terencana dengan baik.

3. Pendekatan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang kuat dalam menyusun Kebijakan Pembangunan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, akan ditempuh pendekatan pembangunan daerah, sebagai berikut :

a. Pendekatan Sejarah/Historis

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat lahir sebagai hasil perjanjian Giyanti yang diadakan pada tahun 1755. Dengan perjanjian tersebut Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat.

Semenjak itu, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berstatus sebagai negara yang berbentuk kerajaan. Persyaratan sebagai negara telah terpenuhi, yakni kedaulatan, wilayah/teritorial hukum, dan penduduk atau rakyat yang mendukung keberadaan negara tersebut.

Pada tahun 1813 Pemerintah Inggris membentuk Kadipaten Paku Alaman, yang merupakan pemerintahan tersendiri dalam wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dengan lahirnya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan dengan tegas, bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman adalah Daerah Istimewa, yang merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 1945, dikeluarkan Penetapan Presiden yang menyatakan bahwa hubungan antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kedua Kepala Negeri bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Penetapan diterima pada tanggal 6 September 1945.

Dengan demikian kedudukan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta semakin kuat, karena memiliki dasar hukum yang akurat, yakni Pasal 18 UUD 1945, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, dan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, khususnya pasal 122.

Demi kepastian hukum, perlu ditetapkan substansi keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berdasarkan faktor historis, kultural, sosiologis, politis maupun yuridis, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu (1) kelembagaan pemerintah, (2) aparat pemerintah, khususnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (3) pertanahan, dan (4) kebudayaan.

b. Pendekatan Wilayah

Sebagai pengembangan keruangan yang mengatur hubungan keserasian, laju pertumbuhan antar daerah, keserasian antara pendayagunaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan serta teknologi, dengan tetap mengacu pada pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan agar pembangunan lebih terarah serta terfokus.

Pendekatan ini adalah usaha dan antisipasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengarahkan pada perkuatan perencanaan di daerah dalam rangka otonomi, sebagai ganti dari sistem yang sentralistik. Apabila pendekatan pada masa lalu dengan sistem sentralistik sektoral, maka pada saat ini justru, dengan melihat kondisi obyektif dan potensi riil serta aspirasi masyarakat setempat, yang diantisipasi dengan berbagai program terpadu dan tersinergi di wilayah tersebut untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Di dalam program terpadu dan tersinergi, terdiri dari sektor utama dan sektor penunjang sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut, sedangkan alokasi proyek dalam sektor adalah jabaran dari konsekwensi logis pelaksanaan program tersebut. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah pengembangan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah pengembangan, yaitu :

1) Wilayah Barat (Pegunungan Menoreh)

Wilayah ini dikembangkan melalui program terpadu yang dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah dengan penekanan pada peningkatan prasarana wilayah serta peningkatan ekonomi kerakyatan.

2) Wilayah Tengah (Iereng Merapi sampai dengan pantai Selatan)

Wilayah pusat Perkotaan Yogyakarta dengan kawasan Malioboro dan Kraton, serta kawasan-kawasan tumbuh cepat dan strategis. Penekanan pengembangan program dalam rangka membuat alternatif pusat kegiatan yang dapat menarik kepadatan kegiatan ke luar dari pusat perkotaan, antara lain dengan menumbuhkan satelit-satelit di sekitar perkotaan Yogyakarta, sedangkan untuk menyatukan wilayah Tengah serta menghubungkan wilayah antar satelit, dengan daerah belakang (*hinter land*), diperlukan pembukaan aksesibilitas dalam bentuk jalan lingkar luar (*outer ring road*).

3) Wilayah Timur (Pegunungan Seribu)

Wilayah ini dikembangkan melalui program terpadu yang dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah dengan penekanan pada pengelolaan sungai bawah tanah, air tanah dan prasarana perhubungan.

4) Wilayah Pesisir Selatan

Wilayah pesisir selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta terbentang sepanjang 110 km mulai dari Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, sampai dengan Kabupaten Kulon Progo.

Wilayah ini memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat kaya dan beragam, baik sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui. Dengan makin berkembangnya aksesibilitas dan fasilitas di wilayah pesisir selatan seperti listrik, dan transportasi, maka potensi pesisir ini akan menjadi tumpuan harapan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pembangunan daerah, potensi pesisir di wilayah bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah, antara lain melalui pengembangan pariwisata, perikanan, dan pertanian.

c. Pendekatan Lingkungan Hidup/Ekologi

Pendekatan ekologi menjadi penting artinya dan menjadi perhatian ketika manusia menyadari terjadinya akibat-akibat sampingan dari aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh manusia. Pengaruh ini bersifat timbal balik, yaitu lingkungan yang dipengaruhi oleh perbuatan manusia kembali memberikan akibat-akibat yang juga mempengaruhi diri manusia itu sendiri. Unsur-unsur yang saling mempengaruhi itu terletak dalam suatu ekosistem, yang satu sama lain saling bergantung dan membutuhkan. Jadi ibarat satu mata rantai yang apabila salah satu bagiannya terputus akan menimbulkan masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup timbul akibat interaksi manusia dalam ekosistem sebagai wujud dorongan kebutuhan hidup baik dalam subsisten maupun tingkat yang lebih tinggi, baik dengan menggunakan teknologi tradisional maupun teknologi tinggi.

Karena masalah lingkungan merupakan masalah yang cukup kompleks yang melibatkan cukup banyak unsur-unsur kelompok dalam masyarakat maka selayaknya penanganan masalah lingkungan tidak hanya terbatas oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu maka pendekatan lingkungan hidup/ekologi sangat dibutuhkan sebagai landasan pembangunan daerah.

d. Pendekatan Kelembagaan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pengembangan potensi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, maka dilakukan pendekatan :

- 1) Pengembangan kemitraan dengan Lembaga-lembaga/Badan-badan baik pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 2) Penataan kelembagaan atau reorganisasi Pemerintah Daerah dan penataan manajemen atau ketatalaksanaan, yang disesuaikan dengan tuntutan ketugasan berdasarkan kewenangan yang ada, dalam rangka efisiensi pelayanan publik/ masyarakat.
- 3) Peningkatan pelayanan pada masyarakat dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik dan bersih yang didukung aparat pemerintah yang profesional, transparan dan akuntabel.
- 4) Penyempurnaan dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- 5) Pembinaan dan pengembangan Badan-badan Usaha Milik Daerah.

e. Pendekatan Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan rakyat, dilakukan pendekatan :

- 1) Pengembangan produk/komoditi unggulan daerah yang berorientasi pasar lokal, regional maupun global.
- 2) Pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif, usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan.
- 3) Penggalan dan pengembangan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan asset daerah.
- 4) Mempertajam alokasi anggaran pembangunan dengan pelaksanaan yang makin efisien dan efektif, dilandasi konsep yang jelas dan transparan.
- 5) Memberikan insentif dan disinsentif kepada investor serta pelaku ekonomi di daerah.

f. Pendekatan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada dasarnya adalah sebagai subyek pembangunan sekaligus sebagai obyek dan penerima manfaat hasil pembangunan. Oleh karena itu dalam pendekatan dilakukan upaya-upaya :

- 1) Peningkatan iman dan taqwa dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku yang berakhlak dan bermoral.
- 2) Peningkatan kemampuan, profesionalisme dan produktivitas kerja melalui berbagai pendidikan dan pelatihan ketrampilan.
- 3) Peningkatan derajat kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental bagi segenap warga masyarakat.
- 4) Pembinaan budi pekerti untuk mewujudkan manusia yang berbudaya dan berkepribadian yang mencerminkan jati diri bangsa.

g. Pendekatan Prasarana dan Sarana

Untuk mendukung keberhasilan tercapainya visi-misi pembangunan daerah, diperlukan prasarana dan sarana pendukung yang memadai, baik yang bersifat fisik seperti fasilitas pelayanan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan, maupun non fisik seperti komitmen diantara para pihak terkait (*stakeholder*), penciptaan suasana aman, tenteram dan damai.

BAB V

PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 - 2005 ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bersifat politis, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengelolaan pembangunan di Daerah, bagi segenap Lembaga Pemerintah, Dunia Usaha, Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan segenap lapisan masyarakat. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Gubernur selaku Kepala Daerah, berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pengelolaan pembangunan, berkewajiban untuk menggerakkan semua potensi dan kekuatan pemerintah beserta masyarakat dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan serta pengawasan pembangunan di daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berkewajiban menetapkan dan melaksanakan Peraturan Daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya untuk memantau dan mengawasi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan maupun pemanfaatan hasil-hasil pembangunan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Komunitas masyarakat yang meliputi unsur lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, sektor swasta dan lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan tinggi di daerah, ikut bertanggungjawab dan berpartisipasi langsung secara aktif sesuai fungsi masing-masing, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan serta memelihara hasil tersebut, sesuai mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, Gubernur berkewajiban untuk menjabarkan ke dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang memuat uraian kebijakan yang terukur dan ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang memuat rencana program pembangunan tahunan yang akan diajukan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN), serta sumber dana lain yang sah. Gubernur merumuskan dan menetapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan mekanisme laporan akuntabilitas, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansial.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

P E N U T U P

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah atau lainnya yang setara tingkatannya.
2. Berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah, tergantung pada peran aktif masyarakat, serta sikap mental, tekad, semangat, serta ketaatan, disiplin, profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas para aparatur pemerintah dan lembaga legislatif, serta masyarakat luas termasuk dunia usaha.
3. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan pembangunan daerah, perlu dikembangkan peran aktif masyarakat dalam menetapkan dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.
4. Hasil pembangunan hendaknya dapat dinikmati sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.
5. Pada akhirnya pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, akan memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat Yogyakarta dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, tenteram, aman dan damai.